

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PENETAPAN KODE PENGENAL
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK
MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2010

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 OKTOBER 2010



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN KODE PENGENAL
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI
PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/
DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi penetapan surat keputusan penyesuaian/penetapan kembali pensiun pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, serta pensiun orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penetapan Kode Pengenal Surat Keputusan Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, Serta Pensiun Orang Tua Dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas dan Tidak Meninggalkan Isteri/Suami atau Anak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah duabelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 34);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PENETAPAN KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA, SERTA PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2010.

Pasal 1

Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, adalah 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan, KEP menunjukkan Keputusan, huruf P atau KR di belakang KEP menunjukkan Pusat atau Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN, ASABRI atau KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero) atau PT. TASPEN (Persero), huruf A di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan diakhiri dengan 2 (dua) angka terakhir tahun penetapan keputusan, sebagaimana tersebut pada nomor urut 1 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, adalah 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan, KEP menunjukkan Keputusan, huruf P atau KR di belakang KEP menunjukkan Pusat atau Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN, ASABRI atau KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero) atau PT. TASPEN (Persero), huruf B di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, dan diakhiri dengan 2 (dua) angka terakhir tahun penetapan keputusan, sebagaimana tersebut pada nomor urut 2 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penyesuaian Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, adalah 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan, KEP menunjukkan Keputusan, huruf P atau KR di belakang KEP menunjukkan Pusat atau Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN, ASABRI atau KC yang diikuti angka kode yang menunjukkan kantor bayar PT. ASABRI (Persero) atau PT. TASPEN (Persero), huruf C di belakang ASABRI atau KC menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, dan diakhiri dengan 2 (dua) angka terakhir tahun penetapan keputusan, sebagaimana tersebut pada nomor urut 3 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Penetapan Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil adalah 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan, KEP menunjukkan Keputusan, PK menunjukkan Penetapan Kembali, huruf P atau KR di belakang KEP menunjukkan Pusat atau Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN, 5 (lima) angka dibelakang huruf P atau KR menunjukkan kode Instansi, huruf A di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan diakhiri dengan 2 (dua) angka terakhir tahun penetapan keputusan, sebagaimana tersebut pada nomor urut 4 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 5

Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil adalah 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan, KEP menunjukkan Keputusan, huruf P atau KR di belakang KEP menunjukkan Pusat atau Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN, 5 (lima) angka dibelakang huruf P atau KR menunjukkan kode Instansi, huruf B di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, dan diakhiri dengan 2 (dua) angka terakhir tahun penetapan keputusan, sebagaimana tersebut pada nomor urut 5 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 6

Kode pengenal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk Surat Keputusan Penetapan Kembali Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak adalah 6 (enam) angka sebagai Nomor Urut Keputusan, KEP menunjukkan Keputusan, huruf P atau KR di belakang KEP menunjukkan Pusat atau Kantor Regional BKN yang diikuti angka Romawi kode Kantor Regional BKN, 5 (lima) angka dibelakang huruf P atau KR menunjukkan kode Instansi, huruf C di belakang kode Instansi menunjukkan Pensiun Orang tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami atau anak, dan diakhiri dengan 2 (dua) angka terakhir tahun penetapan keputusan, sebagaimana tersebut pada nomor urut 6 Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 7

Daftar Kode Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 8

Daftar Kode Kantor Cabang Wilayah Pembayaran PT. TASPEN (Persero) adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 9

Kode Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 10

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2010

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA UNTUK PENYESUAIAN/PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA JANDA/DUDANYA

NO.	JENIS SURAT KEPUTUSAN	KEWENANGAN	KODE PENGENAL SURAT KEPUTUSAN
1	*2*	*3*	*4*
1	SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/P/ASABRI/A/00 000000/KEP/KR/KC/A/00
2	SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN POKOK PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/P/ASABRI/B/00 000000/KEP/KR/KC/B/00
3	SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/P/ASABRI/C/00 000000/KEP/KR/KC/C/00
4	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/PK/P/00000/A/00 000000/KEP/PK/KR/00000/A/00
5	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK PENSIUNAN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/PK/P/00000/B/00 000000/KEP/PK/KR/00000/B/00
6	SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN KEMBALI PENSIUN ORANG TUA DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TEWAS DAN TIDAK MENINGGALKAN ISTERI/SUAMI ATAU ANAK	a. PUSAT b. KANREG	000000/KEP/PK/P/00000/C/00 000000/KEP/PK/KR/00000/C/00

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN II PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

DAFTAR KODE KANTOR REGIONAL BKN

NO.	NAMA KANTOR REGIONAL	NOMOR KODE
1	2	3
1	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	I
2	Kantor Regional II BKN Surabaya	II
3	Kantor Regional III BKN Bandung	III
4	Kantor Regional IV BKN Makassar	IV
5	Kantor Regional V BKN Jakarta	V
6	Kantor Regional VI BKN Medan	VI
7	Kantor Regional VII BKN Palembang	VII
8	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin	VIII
9	Kantor Regional IX BKN Jayapura	IX
10	Kantor Regional X BKN Denpasar	X
11	Kantor Regional XI BKN Manado	XI
12	Kantor Regional XII BKN Riau	XII

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN III PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

DAFTAR KODE KANTOR CABANG WILAYAH PEMBAYARAN
PT. TASPEN (Persero)

NO.	NAMA KANTOR CABANG UTAMA/KANTOR CABANG	NOMOR KODE
1	2	3
1	KCU Jakarta	100
2	Bandar Lampung	101
3	Bengkulu	102
4	Palembang	103
5	Palangka Raya	104
6	Pontianak	105
7	Pangkal Pinang	106
8	KCU Medan	200
9	Banda Aceh	201
10	Pematang Siantar	202
11	Bukittinggi	203
12	Padang	204
13	Pekanbaru	205
14	Jambi	206
15	KCU Bandung	300
16	Bogor	301
17	Tasikmalaya	302
18	Cirebon	303
19	Serang	304
20	KCU Semarang	400
21	Purwokerto	401
22	Surakarta	402
23	Yogyakarta	403
24	Pekalongan	404
25	KCU Surabaya	500
26	Malang	501
27	Madiun	502
28	Kediri	503
29	Banjarmasin	504
30	Samarinda	505
31	KCU Makassar	600
32	Manado	601
33	Palu	602
34	Kendari	603

1	2	3
35	Ambon	604
36	Jayapura	605
37	Gorontalo	606
38	Ternate	607
39	KCU Denpasar	700
40	Kupang	701
41	Mataram	703
42	Jember	704

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN IV PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

KODE INSTANSI PUSAT

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
1	Kementerian Koordinator Bidang Polhukam	11001
2	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	11002
3	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	11003
4	Kementerian Negara Sekretariat Negara	12001
5	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	12002
6	Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM	12003
7	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	12004
8	Kementerian Negara BUMN	12005
9	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12006
10	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	12007
11	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS	12008
12	Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	12009
13	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	12010
14	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	12011
15	Departemen Dalam Negeri	13001
16	Departemen Luar Negeri	13002
17	Departemen Pertahanan	13003
18	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	13004
19	Departemen Keuangan	13005
20	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	13006
21	Departemen Perindustrian	13007
22	Departemen Perdagangan	13008
23	Departemen Pertanian	13009
24	Departemen Kehutanan	13010
25	Departemen Perhubungan	13011
26	Departemen Kelautan dan Perikanan	13012
27	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13013
28	Departemen Pekerjaan Umum	13014
29	Departemen Kesehatan	13015
30	Departemen Pendidikan Nasional	13016
31	Departemen Sosial	13017
32	Departemen Agama	13018
33	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	13019

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
34	Departemen Komunikasi dan Informatika	13020
35	Majelis Permusyawaratan Rakyat	14001
36	Dewan Perwakilan Rakyat	14002
37	Dewan Perwakilan Daerah	14003
38	Mahkamah Agung	14004
39	Badan Pemeriksa Keuangan	14005
40	Mahkamah Konstitusi	14006
41	Komisi Yudisial	14007
42	Arsip Nasional RI	15001
43	Badan Kepegawaian Negara	15002
44	Perpustakaan Nasional RI	15003
45	Badan Pusat Statistik	15004
46	Badan Standardisasi Nasional	15005
47	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	15006
48	Badan Tenaga Nuklir Nasional	15007
49	Badan Intelijen Negara	15008
50	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	15009
51	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	15010
52	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	15011
53	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	15012
54	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15013
55	Badan Pertanahan Nasional	15014
56	Badan Pengawas Obat dan Makanan	15015
57	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	15016
58	Badan Narkotika Nasional	15017
59	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	15018
60	Badan SAR Nasional	15019
61	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	15020
62	Badan Koordinasi Keamanan Laut	15021
63	Lembaga Administrasi Negara	15101
64	Lembaga Sandi Negara	15102
65	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	15103
66	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	15104
67	Lembaga Ketahanan Nasional	15105
68	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	15106
69	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	15201
70	Kejaksaan Agung	16001

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
71	Kepolisian Negara RI	16002
72	Dewan Ketahanan Nasional	16003
73	Komisi Pemilihan Umum	16004
74	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	16005

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

LAMPIRAN V PERATURAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 22 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 OKTOBER 2010

KODE INSTANSI DAERAH

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
1	Pemerintah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam	21100
2	Pemerintah Kab. SIMEULUE	21101
3	Pemerintah Kab. ACEH SINGKIL	21102
4	Pemerintah Kab. ACEH SELATAN	21103
5	Pemerintah Kab. ACEH TENGGARA	21104
6	Pemerintah Kab. ACEH TIMUR	21105
7	Pemerintah Kab. ACEH TENGAH	21106
8	Pemerintah Kab. ACEH BARAT	21107
9	Pemerintah Kab. ACEH BESAR	21108
10	Pemerintah Kab. PIDIE	21109
11	Pemerintah Kab. BIREUEN	21110
12	Pemerintah Kab. ACEH UTARA	21111
13	Pemerintah Kab. ACEH BARAT DAYA	21112
14	Pemerintah Kab. GAYO LUES	21113
15	Pemerintah Kab. ACEH TAMIANG	21114
16	Pemerintah Kab. NAGAN RAYA	21115
17	Pemerintah Kab. ACEH JAYA	21116
18	Pemerintah Kab. BENER MERIAH	21117
19	Pemerintah Kab. PIDIE JAYA	21118
20	Pemerintah Kota BANDA ACEH	21171
21	Pemerintah Kota SABANG	21172
22	Pemerintah Kota LANGSA	21173
23	Pemerintah Kota LHOKSEUMAWE	21174
24	Pemerintah Kota SUBULUSSALAM	21175
25	Pemerintah Provinsi SUMATERA UTARA	21200
26	Pemerintah Kab. NIAS	21201
27	Pemerintah Kab. MANDAILING NATAL	21202
28	Pemerintah Kab. TAPANULI SELATAN	21203
29	Pemerintah Kab. TAPANULI TENGAH	21204
30	Pemerintah Kab. TAPANULI UTARA	21205
31	Pemerintah Kab. TOBA SAMOSIR	21206
32	Pemerintah Kab. LABUHAN BATU	21207
33	Pemerintah Kab. ASAHAN	21208
34	Pemerintah Kab. SIMALUNGUN	21209
35	Pemerintah Kab. DAIRI	21210
36	Pemerintah Kab. KARO	21211
37	Pemerintah Kab. DELI SERDANG	21212
38	Pemerintah Kab. LANGKAT	21213
39	Pemerintah Kab. NIAS SELATAN	21214
40	Pemerintah Kab. HUMBANG HASUNDUTAN	21215

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
41	Pemerintah Kab. PAKPAK BHARAT	21216
42	Pemerintah Kab. SAMOSIR	21217
43	Pemerintah Kab. SERDANG BEDAGAI	21218
44	Pemerintah Kab. BATUBARA	21219
45	Pemerintah Kab. PADANG LAWAS UTARA	21220
46	Pemerintah Kab. PADANG LAWAS	21221
47	Pemerintah Kab. LABUHAN BATU SELATAN	21222
48	Pemerintah Kab. LABUHAN BATU UTARA	21223
49	Pemerintah Kab. NIAS UTARA	21224
50	Pemerintah Kab. NIAS BARAT	21225
51	Pemerintah Kota SIBOLGA	21271
52	Pemerintah Kota TANJUNG BALAI	21272
53	Pemerintah Kota PEMATANG SIANTAR	21273
54	Pemerintah Kota TEBING TINGGI	21274
55	Pemerintah Kota MEDAN	21275
56	Pemerintah Kota BINJAI	21276
57	Pemerintah Kota PADANGSIDEMPUAN	21277
58	Pemerintah Kota Gunung Sitoli	21278
59	Pemerintah Provinsi SUMATERA BARAT	21300
60	Pemerintah Kab. KEPULAUAN MENTAWAI	21301
61	Pemerintah Kab. PESISIR SELATAN	21302
62	Pemerintah Kab. SOLOK	21303
63	Pemerintah Kab. SAWAHLUNTO SIJUNJUNG	21304
64	Pemerintah Kab. TANAH DATAR	21305
65	Pemerintah Kab. PADANG PARIAMAN	21306
66	Pemerintah Kab. AGAM	21307
67	Pemerintah Kab. LIMA PULUH KOTA	21308
68	Pemerintah Kab. PASAMAN	21309
69	Pemerintah Kab. SOLOK SELATAN	21310
70	Pemerintah Kab. DHARMAS RAYA	21311
71	Pemerintah Kab. PASAMAN BARAT	21312
72	Pemerintah Kota PADANG	21371
73	Pemerintah Kota SOLOK	21372
74	Pemerintah Kota SAWAH LUNTO	21373
75	Pemerintah Kota PADANG PANJANG	21374
76	Pemerintah Kota BUKITTINGGI	21375
77	Pemerintah Kota PAYAKUMBUH	21376
78	Pemerintah Kota PARIAMAN	21377
79	Pemerintah Provinsi Riau	21400
80	Pemerintah Kab. KUANTAN SINGINGI	21401
81	Pemerintah Kab. INDRAGIRI HULU	21402
82	Pemerintah Kab. INDRAGIRI HILIR	21403
83	Pemerintah Kab. PELALAWAN	21404
84	Pemerintah Kab. S I A K	21405
85	Pemerintah Kab. KAMPAR	21406
86	Pemerintah Kab. ROKAN HULU	21407

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
87	Pemerintah Kab. BENGKALIS	21408
88	Pemerintah Kab. ROKAN HILIR	21409
89	Pemerintah Kab. MERANTI	21410
90	Pemerintah Kab. ANAMBAS	21411
91	Pemerintah Kota PEKANBARU	21471
92	Pemerintah Kota D U M A I	21472
93	Pemerintah Provinsi JAMBI	21500
94	Pemerintah Kab. KERINCI	21501
95	Pemerintah Kab. MERANGIN	21502
96	Pemerintah Kab. SAROLANGUN	21503
97	Pemerintah Kab. BATANG HARI	21504
98	Pemerintah Kab. MUARO JAMBI	21505
99	Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG TIMUR	21506
100	Pemerintah Kab. TANJUNG JABUNG BARAT	21507
101	Pemerintah Kab. TEBO	21508
102	Pemerintah Kab. BUNGO	21509
103	Pemerintah Kota JAMBI	21571
104	Pemerintah Kota SUNGAI PENUH	21572
105	Pemerintah Provinsi SUMATERA SELATAN	21600
106	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU	21601
107	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ILIR	21602
108	Pemerintah Kab. MUARA ENIM	21603
109	Pemerintah Kab. LAHAT	21604
110	Pemerintah Kab. MUSI RAWAS	21605
111	Pemerintah Kab. MUSI BANYUASIN	21606
112	Pemerintah Kab. BANYUASIN	21607
113	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU SELATAN	21608
114	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU TIMUR	21609
115	Pemerintah Kab. OGAN ILIR	21610
116	Pemerintah Kab. OGAN KOMERING ULU UTARA	21611
117	Pemerintah Kab. EMPAT LAWANG	21612
118	Pemerintah Kota PALEMBANG	21671
119	Pemerintah Kota PRABUMULIH	21672
120	Pemerintah Kota PAGAR ALAM	21673
121	Pemerintah Kota LUBUKLINGGAU	21674
122	Pemerintah Provinsi BENGKULU	21700
123	Pemerintah Kab. BENGKULU SELATAN	21701
124	Pemerintah Kab. REJANG LEBONG	21702
125	Pemerintah Kab. BENGKULU UTARA	21703
126	Pemerintah Kab. KAUR	21704
127	Pemerintah Kab. SELUMA	21705
128	Pemerintah Kab. MUKOMUKO	21706
129	Pemerintah Kab. LEBONG	21707
130	Pemerintah Kab. KEPAHIANG	21708
131	Pemerintah Kab. BENGKULU TENGAH	21709

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
132	Pemerintah Kota BENGKULU	21771
133	Pemerintah Provinsi LAMPUNG	21800
134	Pemerintah Kab. LAMPUNG BARAT	21801
135	Pemerintah Kab. TANGGAMUS	21802
136	Pemerintah Kab. LAMPUNG SELATAN	21803
137	Pemerintah Kab. LAMPUNG TIMUR	21804
138	Pemerintah Kab. LAMPUNG TENGAH	21805
139	Pemerintah Kab. LAMPUNG UTARA	21806
140	Pemerintah Kab. WAY KANAN	21807
141	Pemerintah Kab. TULANGBAWANG	21808
142	Pemerintah Kab. PESAWARAN	21809
143	Pemerintah Kab. MESUJI	21810
144	Pemerintah Kab. PRINGSEWU	21811
145	Pemerintah Kab. TULANG BAWANG BARAT	21812
146	Pemerintah Kota BANDAR LAMPUNG	21871
147	Pemerintah Kota METRO	21872
148	Pemerintah Provinsi BANGKA BELITUNG	21900
149	Pemerintah Kab. BANGKA	21901
150	Pemerintah Kab. BELITUNG	21902
151	Pemerintah Kab. BANGKA BARAT	21903
152	Pemerintah Kab. BANGKA TENGAH	21904
153	Pemerintah Kab. BANGKA SELATAN	21905
154	Pemerintah Kab. BELITUNG TIMUR	21906
155	Pemerintah Kota PANGKAL PINANG	21971
156	Pemerintah Provinsi KEPULAUAN RIAU	22100
157	Pemerintah Kab. KARIMUN	22101
158	Pemerintah Kab. BINTAN	22102
159	Pemerintah Kab. NATUNA	22103
160	Pemerintah Kab. LINGGA	22104
161	Pemerintah Kab. KEPULAUAN ANAMBAS	22105
162	Pemerintah Kota BATAM	22171
163	Pemerintah Kota TANJUNG PINANG	22172
164	Pemerintah Provinsi DKI JAKARTA	23100
165	Pemerintah Provinsi JAWA BARAT	23200
166	Pemerintah Kab. BOGOR	23201
167	Pemerintah Kab. SUKABUMI	23202
168	Pemerintah Kab. CIANJUR	23203
169	Pemerintah Kab. BANDUNG	23204
170	Pemerintah Kab. GARUT	23205
171	Pemerintah Kab. TASIKMALAYA	23206
172	Pemerintah Kab. CIAMIS	23207
173	Pemerintah Kab. KUNINGAN	23208
174	Pemerintah Kab. CIREBON	23209
175	Pemerintah Kab. MAJALENGKA	23210
176	Pemerintah Kab. SUMEDANG	23211
177	Pemerintah Kab. INDRAMAYU	23212

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
178	Pemerintah Kab. SUBANG	23213
179	Pemerintah Kab. PURWAKARTA	23214
180	Pemerintah Kab. KARAWANG	23215
181	Pemerintah Kab. BEKASI	23216
182	Pemerintah Kab. BANDUNG BARAT	23217
183	Pemerintah Kota BOGOR	23271
184	Pemerintah Kota SUKABUMI	23272
185	Pemerintah Kota BANDUNG	23273
186	Pemerintah Kota CIREBON	23274
187	Pemerintah Kota BEKASI	23275
188	Pemerintah Kota DEPOK	23276
189	Pemerintah Kota CIMAHI	23277
190	Pemerintah Kota TASIKMALAYA	23278
191	Pemerintah Kota BANJAR	23279
192	Pemerintah Provinsi JAWA TENGAH	23300
193	Pemerintah Kab. CILACAP	23301
194	Pemerintah Kab. BANYUMAS	23302
195	Pemerintah Kab. PURBALINGGA	23303
196	Pemerintah Kab. BANJARNEGARA	23304
197	Pemerintah Kab. KEBUMEN	23305
198	Pemerintah Kab. PURWOREJO	23306
199	Pemerintah Kab. WONOSOBO	23307
200	Pemerintah Kab. MAGELANG	23308
201	Pemerintah Kab. BOYOLALI	23309
202	Pemerintah Kab. KLATEN	23310
203	Pemerintah Kab. SUKOHARJO	23311
204	Pemerintah Kab. WONOGIRI	23312
205	Pemerintah Kab. KARANGANYAR	23313
206	Pemerintah Kab. SRAGEN	23314
207	Pemerintah Kab. GROBOGAN	23315
208	Pemerintah Kab. BLORA	23316
209	Pemerintah Kab. REMBANG	23317
210	Pemerintah Kab. PATI	23318
211	Pemerintah Kab. KUDUS	23319
212	Pemerintah Kab. JEPARA	23320
213	Pemerintah Kab. DEMAK	23321
214	Pemerintah Kab. SEMARANG	23322
215	Pemerintah Kab. TEMANGGUNG	23323
216	Pemerintah Kab. KENDAL	23324
217	Pemerintah Kab. BATANG	23325
218	Pemerintah Kab. PEKALONGAN	23326
219	Pemerintah Kab. PEMALANG	23327
220	Pemerintah Kab. TEGAL	23328
221	Pemerintah Kab. BREBES	23329
222	Pemerintah Kota MAGELANG	23371
223	Pemerintah Kota SURAKARTA	23372

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
224	Pemerintah Kota SALATIGA	23373
225	Pemerintah Kota SEMARANG	23374
226	Pemerintah Kota PEKALONGAN	23375
227	Pemerintah Kota TEGAL	23376
228	Pemerintah Provinsi D.I. YOGYAKARTA	23400
229	Pemerintah Kab. KULON PROGO	23401
230	Pemerintah Kab. BANTUL	23402
231	Pemerintah Kab. GUNUNG KIDUL	23403
232	Pemerintah Kab. SLEMAN	23404
233	Pemerintah Kota YOGYAKARTA	23471
234	Pemerintah Provinsi JAWA TIMUR	23500
235	Pemerintah Kab. PACITAN	23501
236	Pemerintah Kab. PONOROGO	23502
237	Pemerintah Kab. TRENGGALEK	23503
238	Pemerintah Kab. TULUNGAGUNG	23504
239	Pemerintah Kab. BLITAR	23505
240	Pemerintah Kab. KEDIRI	23506
241	Pemerintah Kab. MALANG	23507
242	Pemerintah Kab. LUMAJANG	23508
243	Pemerintah Kab. JEMBER	23509
244	Pemerintah Kab. BANYUWANGI	23510
245	Pemerintah Kab. BONDOWOSO	23511
246	Pemerintah Kab. SITUBONDO	23512
247	Pemerintah Kab. PROBOLINGGO	23513
248	Pemerintah Kab. PASURUAN	23514
249	Pemerintah Kab. SIDOARJO	23515
250	Pemerintah Kab. MOJOKERTO	23516
251	Pemerintah Kab. JOMBANG	23517
252	Pemerintah Kab. NGANJUK	23518
253	Pemerintah Kab. MADIUN	23519
254	Pemerintah Kab. MAGETAN	23520
255	Pemerintah Kab. NGAWI	23521
256	Pemerintah Kab.BOJONEGORO	23522
257	Pemerintah Kab.TUBAN	23523
258	Pemerintah Kab. LAMONGAN	23524
259	Pemerintah Kab. GRESIK	23525
260	Pemerintah Kab. BANGKALAN	23526
261	Pemerintah Kab. SAMPANG	23527
262	Pemerintah Kab. PAMEKASAN	23528
263	Pemerintah Kab.SUMENEP	23529
264	Pemerintah Kota KEDIRI	23571
265	Pemerintah Kota BLITAR	23572
266	Pemerintah Kota MALANG	23573
267	Pemerintah Kota PROBOLINGGO	23574
268	Pemerintah Kota PASURUAN	23575
269	Pemerintah Kota MOJOKERTO	23576

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
270	Pemerintah Kota MADIUN	23577
271	Pemerintah Kota SURABAYA	23578
272	Pemerintah Kota BATU	23579
273	Pemerintah Provinsi BANTEN	23600
274	Pemerintah Kab. PANDEGLANG	23601
275	Pemerintah Kab. LEBAK	23602
276	Pemerintah Kab. TANGERANG	23603
277	Pemerintah Kab. SERANG	23604
278	Pemerintah Kota TANGERANG	23671
279	Pemerintah Kota CILEGON	23672
280	Pemerintah Kota SERANG	23673
281	Pemerintah Kota TANGERANG SELATAN	23674
282	Pemerintah Provinsi BALI	25100
283	Pemerintah Kab. JEMBRANA	25101
284	Pemerintah Kab. TABANAN	25102
285	Pemerintah Kab. BADUNG	25103
286	Pemerintah Kab. GIANYAR	25104
287	Pemerintah Kab. KLUNGKUNG	25105
288	Pemerintah Kab. BANGLI	25106
289	Pemerintah Kab. KARANG ASEM	25107
290	Pemerintah Kab. BULELENG	25108
291	Pemerintah Kab. SABURAIJUA	25109
293	Pemerintah Kota Denpasar	25171
294	Pemerintah Provinsi NTB	25200
295	Pemerintah Kab. LOMBOK BARAT	25201
296	Pemerintah Kab. LOMBOK TENGAH	25202
297	Pemerintah Kab. LOMBOK TIMUR	25203
298	Pemerintah Kab. SUMBAWA	25204
299	Pemerintah Kab. DOMPU	25205
300	Pemerintah Kab. BIMA	25206
301	Pemerintah Kab. SUMBAWA BARAT	25207
302	Pemerintah Kab. LOMBOK UTARA	25208
303	Pemerintah Kota MATARAM	25271
304	Pemerintah Kota BIMA	25272
305	Pemerintah Provinsi NTT	25300
306	Pemerintah Kab. SUMBA BARAT	25301
307	Pemerintah Kab. SUMBA TIMUR	25302
308	Pemerintah Kab. KUPANG	25303
308	Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH SELATAN	25304
309	Pemerintah Kab. TIMOR TENGAH UTARA	25305
310	Pemerintah Kab. BELU	25306
311	Pemerintah Kab. ALOR	25307
312	Pemerintah Kab. LEMBATA	25308
313	Pemerintah Kab. FLORES TIMUR	25309
314	Pemerintah Kab. SIKKA	25310
315	Pemerintah Kab. ENDE	25311

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
316	Pemerintah Kab. NGADA	25312
317	Pemerintah Kab. MANGGARAI	25313
318	Pemerintah Kab. ROTE NDAO	25314
319	Pemerintah Kab. MANGGARAI BARAT	25315
320	Pemerintah Kab. SUMBA TENGAH	25316
321	Pemerintah Kab. SUMBA BARAT DAYA	25317
322	Pemerintah Kab. NAGEKEO	25318
323	Pemerintah Kab. MANGGARAI TIMUR	25319
324	Pemerintah Kota KUPANG	25371
325	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN BARAT	26100
326	Pemerintah Kab. SAMBAS	26101
327	Pemerintah Kab. BENGKAYANG	26102
328	Pemerintah Kab. LANDAK	26103
329	Pemerintah Kab. PONTIANAK	26104
330	Pemerintah Kab. SANGGAU	26105
331	Pemerintah Kab. KETAPANG	26106
332	Pemerintah Kab. SINTANG	26107
333	Pemerintah Kab. KAPUAS HULU	26108
334	Pemerintah Kab. SEKADAU	26109
335	Pemerintah Kab. MELAWI	26110
336	Pemerintah Kab. KAYONG UTARA	26111
337	Pemerintah Kab. KUBU RAYA	26112
338	Pemerintah Kota PONTIANAK	26171
339	Pemerintah Kota SINGKAWANG	26172
340	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN TENGAH	26200
341	Pemerintah Kab. KOTAWARINGIN BARAT	26201
342	Pemerintah Kab. KOTAWARINGIN TIMUR	26202
343	Pemerintah Kab. KAPUAS	26203
344	Pemerintah Kab. BARITO SELATAN	26204
345	Pemerintah Kab. BARITO UTARA	26205
346	Pemerintah Kab. SUKAMARA	26206
347	Pemerintah Kab. LAMANDAU	26207
348	Pemerintah Kab. SERUYAN	26208
349	Pemerintah Kab. KATINGAN	26209
350	Pemerintah Kab. PULANG PISAU	26210
351	Pemerintah Kab. GUNUNG MAS	26211
352	Pemerintah Kab. BARITO TIMUR	26212
353	Pemerintah Kab. MURUNG RAYA	26213
354	Pemerintah Kota PALANGKA RAYA	26271
355	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN SELATAN	26300
356	Pemerintah Kab. TANAH LAUT	26301
357	Pemerintah Kab. KOTA BARU	26302
358	Pemerintah Kab. BANJAR	26303
359	Pemerintah Kab. BARITO KUALA	26304
360	Pemerintah Kab. TAPIN	26305
361	Pemerintah Kab. HULU SUNGAI SELATAN	26306

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
362	Pemerintah Kab. HULU SUNGAI TENGAH	26307
363	Pemerintah Kab. HULU SUNGAI UTARA	26308
364	Pemerintah Kab. TABALONG	26309
365	Pemerintah Kab. TANAH BUMBU	26310
366	Pemerintah Kab. BALANGAN	26311
367	Pemerintah Kota BANJARMASIN	26371
368	Pemerintah Kota BANJAR BARU	26372
369	Pemerintah Provinsi KALIMANTAN TIMUR	26400
370	Pemerintah Kab. PASIR	26401
371	Pemerintah Kab. KUTAI BARAT	26402
372	Pemerintah Kab. KUTAI KARTANEGARA	26403
373	Pemerintah Kab. KUTAI TIMUR	26404
374	Pemerintah Kab. BERAU	26405
375	Pemerintah Kab. MALINAU	26406
376	Pemerintah Kab. BULUNGAN	26407
377	Pemerintah Kab. NUNUKAN	26408
378	Pemerintah Kab. PENAJAM PASER UTARA	26409
379	Pemerintah Kab. TANA TIDUNG	26410
380	Pemerintah Kota BALIKPAPAN	26471
381	Pemerintah Kota SAMARINDA	26472
382	Pemerintah Kota TARAKAN	26473
383	Pemerintah Kota BONTANG	26474
384	Pemerintah Provinsi SULAWESI UTARA	27100
385	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW	27101
386	Pemerintah Kab. MINAHASA	27102
387	Pemerintah Kab. KEPULAUAN SANGIHE	27103
388	Pemerintah Kab. KEPULAUAN TALAUD	27104
389	Pemerintah Kab. MINAHASA SELATAN	27105
390	Pemerintah Kab. MINAHASA UTARA	27106
391	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW UTARA	27107
392	Pemerintah Kab. SIAU TAGULANDANG BIARO	27108
393	Pemerintah Kab. MINAHASA TENGGARA	27109
394	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	27110
395	Pemerintah Kab. BOLAANG MONGONDOW TIMUR	27111
396	Pemerintah Kota MANADO	27171
397	Pemerintah Kota BITUNG	27172
398	Pemerintah Kota TOMOHON	27173
399	Pemerintah Kota KOTAMOBAGU	27174
400	Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGAH	27200
401	Pemerintah Kab. BANGGAI KEPULAUAN	27201
402	Pemerintah Kab. BANGGAI	27202
403	Pemerintah Kab. MOROWALI	27203
404	Pemerintah Kab. POSO	27204
405	Pemerintah Kab. DONGGALA	27205
406	Pemerintah Kab. TOLI-TOLI	27206
407	Pemerintah Kab. BUOL	27207

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
408	Pemerintah Kab. PARIGI MOUTONG	27208
409	Pemerintah Kab. TOJO UNA-UNA	27209
410	Pemerintah Kab. SIGI	27210
411	Pemerintah Kota PALU	27271
412	Pemerintah Provinsi SULAWESI SELATAN	27300
413	Pemerintah Kab. SELAYAR	27301
414	Pemerintah Kab. BULUKUMBA	27302
415	Pemerintah Kab. BANTAENG	27303
416	Pemerintah Kab. JENEPONTO	27304
417	Pemerintah Kab. TAKALAR	27305
418	Pemerintah Kab. GOWA	27306
419	Pemerintah Kab. SINJAI	27307
420	Pemerintah Kab. MAROS	27308
421	Pemerintah Kab. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	27309
422	Pemerintah Kab. BARRU	27310
423	Pemerintah Kab. BONE	27311
424	Pemerintah Kab. SOPPENG	27312
425	Pemerintah Kab. WAJO	27313
426	Pemerintah Kab. SIDENRENG RAPPANG	27314
427	Pemerintah Kab. PINRANG	27315
428	Pemerintah Kab. ENREKANG	27316
429	Pemerintah Kab. LUWU	27317
430	Pemerintah Kab. TANA TORAJA	27318
431	Pemerintah Kab. LUWU UTARA	27319
432	Pemerintah Kab. LUWU TIMUR	27320
433	Pemerintah Kab. TORAJA UTARA	27321
434	Pemerintah Kota MAKASSAR	27371
435	Pemerintah Kota PARE-PARE	27372
436	Pemerintah Kota PALOPO	27373
437	Pemerintah Provinsi SULAWESI TENGGARA	27400
438	Pemerintah Kab. BUTON	27401
439	Pemerintah Kab. MUNA	27402
440	Pemerintah Kab. KONAWE	27403
441	Pemerintah Kab. KOLAKA	27404
442	Pemerintah Kab. KONAWE SELATAN	27405
443	Pemerintah Kab. BOMBANA	27406
444	Pemerintah Kab. WAKATOBI	27407
445	Pemerintah Kab. KOLAKA UTARA	27408
446	Pemerintah Kab. BUTON UTARA	27409
447	Pemerintah Kab. KONAWE UTARA	27410
448	Pemerintah Kota KENDARI	27471
449	Pemerintah Kota BAU-BAU	27472
450	Pemerintah Provinsi GORONTALO	27500
451	Pemerintah Kab. BOALEMO	27501
452	Pemerintah Kab. GORONTALO	27502
453	Pemerintah Kab. POHUWATO	27503

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
454	Pemerintah Kab. BONE BOLANGO	27504
455	Pemerintah Kab. GORONTALO UTARA	27505
456	Pemerintah Kota GORONTALO	27571
457	Pemerintah Provinsi SULAWESI BARAT	27600
458	Pemerintah Kab. MAJENE	27601
459	Pemerintah Kab. POLEWALI MANDAR	27602
460	Pemerintah Kab. MAMASA	27603
461	Pemerintah Kab. MAMUJU	27604
462	Pemerintah Kab. MAMUJU UTARA	27605
463	Pemerintah Provinsi MALUKU	28100
464	Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA BARAT	28101
465	Pemerintah Kab. MALUKU TENGGARA	28102
466	Pemerintah Kab. MALUKU TENGAH	28103
467	Pemerintah Kab. BURU	28104
468	Pemerintah Kab. KEPULAUAN ARU	28105
469	Pemerintah Kab. SERAM BAGIAN BARAT	28106
470	Pemerintah Kab. SERAM BAGIAN TIMUR	28107
471	Pemerintah Kab. BURU SELATAN	28108
472	Pemerintah Kab. MALUKU BARAT DAYA	28109
473	Pemerintah Kota AMBON	28171
474	Pemerintah Kota TUAL	28172
475	Pemerintah Provinsi MALUKU UTARA	28200
476	Pemerintah Kab. HALMAHERA BARAT	28201
477	Pemerintah Kab. HALMAHERA TENGAH	28202
478	Pemerintah Kab. KEPULAUAN SULA	28203
479	Pemerintah Kab. HALMAHERA SELATAN	28204
480	Pemerintah Kab. HALMAHERA UTARA	28205
481	Pemerintah Kab. HALMAHERA TIMUR	28206
482	Pemerintah Kab. MOROTAI	28207
483	Pemerintah Kota TERNATE	28271
484	Pemerintah Kota TIDORE KEPULAUAN	28272
485	Pemerintah Provinsi PAPUA BARAT	29100
486	Pemerintah Kab. FAKFAK	29101
487	Pemerintah Kab. KAIMANA	29102
488	Pemerintah Kab. TELUK WONDAMA	29103
489	Pemerintah Kab. TELUK BINTUNI	29104
490	Pemerintah Kab. MANOKWARI	29105
491	Pemerintah Kab. SORONG SELATAN	29106
492	Pemerintah Kab. SORONG	29107
493	Pemerintah Kab. RAJA AMPAT	29108
494	Pemerintah Kab. MEIBRAT	29109
495	Pemerintah Kab. TAMBRUW	29110
496	Pemerintah Kota SORONG	29171
497	Pemerintah Provinsi PAPUA	29400
498	Pemerintah Kab. MERAUKE	29401
499	Pemerintah Kab. JAYAWIJAYA	29402

No	INSTANSI	KODE
1	2	3
500	Pemerintah Kab. JAYAPURA	29403
501	Pemerintah Kab. NABIRE	29404
502	Pemerintah Kab. YAPEN WAROPEN`	29405
503	Pemerintah Kab. BIAK NUMFOR	29406
504	Pemerintah Kab. PANIAI	29407
505	Pemerintah Kab. PUNCAK JAYA	29408
506	Pemerintah Kab. MIMIKA	29409
507	Pemerintah Kab. BOVEN DIGOEL	29410
508	Pemerintah Kab. MAPPI	29411
509	Pemerintah Kab. ASMAT	29412
510	Pemerintah Kab. YAHUKIMO	29413
511	Pemerintah Kab. PEGUNUNGAN BINTANG	29414
512	Pemerintah Kab. TOLIKARA	29415
513	Pemerintah Kab. SARMI	29416
514	Pemerintah Kab. KEEROM	29417
515	Pemerintah Kab. WAROPEN	29418
516	Pemerintah Kab. SUPIORI	29419
517	Pemerintah Kab. MAMBERAMO RAYA	29420
518	Pemerintah Kab. MAMBERAMO TENGAH	29421
519	Pemerintah Kab. LANI JAYA	29422
520	Pemerintah Kab. YALIMO	29423
521	Pemerintah Kab. NDUNGGA	29424
522	Pemerintah Kab. DOGIYAI	29425
523	Pemerintah Kab. DEYAI	29426
524	Pemerintah Kab. INTAN JAYA	29427
525	Pemerintah Kab. PUNCAK	29428
526	Pemerintah Kota JAYAPURA	29471

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI